



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA KABUPATEN PELALAWAN

Niken Ayu Ersanti<sup>1</sup>, Nur Azlina<sup>2\*</sup>, Rofika<sup>3</sup>

Universitas Riau<sup>1</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Jl. HR. Subrantas KM 12.5, Pekanbaru

\*nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

### Abstract

*This research aims to analyze the influence of government governance, use of technology and human resource competence on the implementation of regional government information systems. The outpatient department in Pelalawan Regency will serve as the site of this study. This study included 39 outpatient clinics (OPDs) in Pelalawan Regency as its population. This study employed saturation sampling, a method of data collecting in which the entire population is considered for inclusion in the sample. A census, in which the entire population is sampled, is another name for this saturated sample. Consequently, 148 Regional Apparatus Organisations (OPD) from the Regional Government of Pelalawan Regency make up the sample for this research. In this study, a questionnaire was used to gather data. Using the SPSS method, we tested our research hypotheses. The study's findings highlight the importance of government leadership, technological proficiency, and human resource competency in determining the success or failure of regional government information system rollouts.*

*Keywords: Government Governance, Utilization of Technology, Human Resources Competency and Regional Government Information System.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia terhadap sistem informasi daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada OPD di Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah OPD yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebanyak 39 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "sampling jenuh", yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang ada digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh ini juga disebut dengan istilah lain yaitu sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu, 148 sampel diambil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dengan menggunakan metode SPSS, kami menguji hipotesis penelitian. Sejumlah faktor ditemukan secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem informasi pemerintah daerah, termasuk tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

### PENDAHULUAN

Memasuki revolusi industri, akuntansi sektor publik memainkan peran yang semakin



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

penting dalam memastikan kelancaran operasi pemerintah. Sebagai hasilnya, pemerintah terus menerapkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan pelaporan manajemen keuangan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kualitas serta menerapkan reformasi dalam manajerial keuangan. Laporan keuangan pemerintah harus mencakup informasi yang membantu pengguna mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan yang tepat.

Sejalan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penatausahaan data pembangunan daerah, data keuangan daerah, dan data pemerintah daerah yang dapat dipakai pada pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai aspek integral dari *e-government*, SIPD memainkan peran penting dalam RDP dengan menciptakan pemerintahan yang menangani masalah-masalah lokal, mendorong keterlibatan yang lebih demokratis dalam RDP, dan membuka komunikasi antara masyarakat dan pejabat (Mendagri RI, 2019).

Penggunaan SIPD, sebuah sistem informasi terkomputerisasi, merupakan contoh bagaimana pemerintah daerah menjadikan teknologi informasi sebagai alat untuk mengelola keuangan mereka. Dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD, Pasal 274 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 33 Tahun 2020, diperjelas bahwa seluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib menerapkan SIPD. Artinya, setiap provinsi, kabupaten, dan kota harus memasukkan data serta informasi yang dikontrol SIPD ke dalam proses perencanaan pembangunan mereka. Atas dasar itulah, SIPD dapat semakin memantapkan dirinya sebagai sumber daya yang dapat diandalkan dan memudahkan daerah dalam merencanakan pertumbuhannya dengan menggunakan data yang jujur dan transparan.

Fenomena yang menjadi sorotan saat ini dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terjadi di Provinsi Riau yaitu Sejumlah OPD masih terkendala dalam penerapan SIPD. Ketua DPRD Riau, Yulisman menyebutkan SIPD masih dalam proses transisi dan terjadi beberapa masalah seperti *update* dana perjalanan dinas dan gaji pegawai (Dnaberita.com, 2022).



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Selain itu, Pelalawan, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, juga menghadapi masalah SIPD. Secara spesifik, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih enggan menerapkan sistem baru, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Keraguan ini diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga Tahun Anggaran 2021. (Kompiana.com, 2023).

Pada penelitian sebelumnya terdapat *gap* di hasil penelitian terdahulu. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berbeda beda di setiap penelitian. Riset yang dibuat Firmansyah *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Namun, temuan riset yang dibuat Ryanda & Syofyan (2021), mengatakan kalau tata kelola sistem tidak berpengaruh kepada ketepatan waktu penyampaian data finansial. Pada riset Siregar *et al.*, (2023) yang menyatakan teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. Namun, temuan riset Indriani *et al.*, (2018), mengatakan kalau dampak teknologi tidak berimplikasi apa-apa kepada penerapan SAP berbasis akrual. Kemudian penelitian Azlina *et al.*, (2020) menyatakan *Human Resources Competency* berpengaruh terhadap *Implementation PP Number 12 Year 2019*. Namun, hasil riset Balqis *et al.*, (2021) menyatakan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala terhadap implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Melalui *gap* tersebut menghasilkan periset yang tertari dan terpicu termotivasi dalam membuat riset dengan mengembangkan riset yang dibuat dari Siregar *et al.*, (2023) yang berjudul “Pengaruh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD”.

Adanya sesuatu yang beda pada riset ini dengan riset yang dibuat Siregar *et al.*, (2023) ialah mengganti variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap implementasi SIPD, yaitu variabel tata kelola pemerintah serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengganti objek penelitian yang sebelumnya pada OPD Kabupaten Siak, diganti dengan OPD di Kabupaten Pelalawan.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, maka periset meneliti kembali yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Kabupaten Pelalawan”.

## LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Teori Stewardship*

*Stewardship theory* memposisikan para eksekutif perusahaan sebagai *stewards* yang menyediakan layanan penting bagi perusahaan. Pemerintah di tingkat lokal bertindak sebagai pengawas dan penatalayan, menyediakan data yang berharga bagi organisasi dan pihak-pihak lain yang menggunakan catatan keuangan pemerintah. (Donalson, et al dalam Yoyo et al. (2017)). Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian yaitu untuk mengemukakan kalau suksesnya organisasi bisa dipenuhi melalui kualitas organisasi yang efektif serta baik melalui beberapa faktor pendukung sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna informasi terutama informasi mengenai laporan keuangan dalam pemerintahan khususnya pemerintah daerah dengan mengerahkan kemampuannya dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik (Wilson, 2014).

### *Sistem Informasi*

*Database management system* mengandalkan data sebagai komponen utamanya. Tujuan utama sistem informasi adalah menghasilkan data. Mengutip pendapat O'Brian (2013) sebagaimana dikutip dalam Yakub (2014:16), sistem informasi organisasi adalah integrasi sistematis sumber daya manusia, program komputer, dan sumber daya data yang digunakan untuk mengumpulkan dan berbagi informasi.

### *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*

Berlandaskan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 terkait SIPD, dijelaskan kalau, “Setiap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia wajib mengadopsi SIPD dan menggunakan data dan informasinya untuk perencanaan pembangunan yang komprehensif.” (Mendagri RI, 2014).



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## ***Tata Kelola Pemerintahan***

Sedarmayanti mengatakan (2017:276) Negara yang menerapkan *good government governance* memastikan bahwa para wakil rakyatnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa publik, bisnis, dan pemerintah bekerja sama untuk kebaikan bersama.

## ***Pemanfaatan Teknologi***

Teknologi informasi menurut Kadir (2018) adalah program dan perangkat komputer. Perangkat keras teknologi informasi (TI) mencakup hal-hal seperti RAM, printer, dan keyboard.

## ***Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)***

Kualitas dalam melakukan suatu tugas dengan baik dan dengan standar yang tinggi yang bergantung pada pengetahuan, kemampuan, dan sikap seseorang adalah apa yang dimaksud oleh Edison dkk. (2016) ketika mereka mengatakan bahwa seseorang itu kompeten.

## ***Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis***

### ***Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah***

*Cadbury Committee of United Kingdom* pada Agoes & Ardana mengatakan (2013:102), tata kelola sistem pemerintahan adalah: “Kerangka kerja yang memandu dan mengatur para pemegang saham; juga mengatur hubungan antara kreditur, karyawan, pemerintah, dan manajemen (manajer), serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, termasuk hak dan tanggung jawab mereka”. Keterbukaan informasi pemerintah merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Berkaitan dengan teori *stewardship*, dalam pemerintah daerah, *stewardship theory* dipraktikkan dengan memastikan bahwa kepala daerah mampu memenuhi misi dan tanggung jawab masyarakat. Masyarakat telah menaruh kepercayaan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah tersebut harus mampu melaksanakan tanggung jawab mereka dan menggunakan kekuasaan mereka sebaik mungkin dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jika mereka tidak dapat memenuhi tugas-tugas ini untuk keuntungan mereka sendiri, mereka akan



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

menyelesaikannya sampai tuntas demi kepentingan prinsip atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat menghindari perselisihan dengan para pemegang saham dan mungkin memenangkan hati masyarakat yang lebih percaya. Dengan demikian, membangun praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu perwujudan dari *stewardship theory* seperti yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola sistem pemerintahan berpengaruh terhadap implementasi SIPD. Hal ini dikarenakan SIPD lebih efektif diimplementasikan ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan transparan dalam penyajiannya. Hal ini sesuai dengan temuan Firmansyah *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akruar.

## **H1: Tata Kelola Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.**

### *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

Ikhsan mengatakan (2018), Ketika anda perlu bekerja dengan informasi atau menyelesaikan tugas yang terkait dengan pemrosesan informasi, anda dapat mengandalkan teknologi informasi. Sejak diberlakukannya Permendagri No. 70 Tahun 2019, pemerintah diwajibkan untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk tujuan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban hasil pengelolaan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya proses pembangunan yang baik dan maju, kami mengantisipasi bahwa Pemerintah Daerah akan dengan cepat memasukkan semua data yang relevan, termasuk statistik keuangan dan pembangunan daerah, ke dalam SIPD untuk mempercepat implementasinya. Dengan demikian, Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD akan semakin sering diimplementasikan seiring dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Baik masyarakat maupun pejabat pemerintah, atau steward dan kepala sekolah, bekerja untuk mencapai tujuan yang sama menurut teori penatalayanan. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat memetik sejumlah manfaat dari teknologi informasi jika digunakan secara maksimal. Dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

mampu beradaptasi dengan kebutuhan baru, teknologi informasi dapat memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan data secara akurat dan tepat.

Dalam pendekatan ini, Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD akan lebih banyak digunakan secara proporsional dengan peningkatan penggunaan TI. Hal ini sejalan dengan temuan Siregar *et al.*, (2023) yang menyatakan teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD.

## **H2: Pemanfaatan Teknologi Berpengaruh Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.**

### *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

Suparno mengatakan (2014), menjadi kompeten berarti Anda memiliki keterampilan dan bakat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemampuan untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab sebagai individu, kelompok, atau sistem untuk mencapai tujuan secara tepat waktu dan efektif adalah salah satu ukuran kompetensi sumber daya manusia.

Mereka yang bertanggung jawab, sesuai dengan *stewardship theory* (juga dikenal sebagai teori manajemen), akan membuat keputusan yang disengaja, cerdas, dan masuk akal yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Komponen penting dalam membantu *stewardship* dalam memenuhi tugas mereka adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Jadi, dapat dinyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dipengaruhi oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), karena tingkat keahlian pengguna menentukan kualitas laporan yang dihasilkan oleh sistem. Temuan ini konsisten dengan temuan Azlina *et al.*, (2020) menyatakan *Human Resources Competency* berpengaruh terhadap *Implementation PP Number 12 Year 2019*.

## **H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.**



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## METODE PENELITIAN

Salah satu pemerintah daerah di Provinsi Riau-Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan-menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai tahun 2022 dan berlanjut hingga selesai. Sebelas kecamatan, enam badan, delapan belas dinas, satu badan, satu kantor, satu inspektorat, dan satu sekretariat merupakan bagian dari 39 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Pelalawan yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampling jenuh untuk memilih sampel dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Penelitian jenis kuantitatif digunakan dalam investigasi ini. Informasi tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah Pelalawan dalam menerapkan sistem informasi pemerintahan, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari setiap responden di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pada variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), peneliti memakai indikator instrument Dimova dan Stirk (2019). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diukur memakai skala ordinal 5 point dengan indikatornya yaitu Pengembangan Sistem Akuntansi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penguatan Kinerja dalam Pengelolaan SIPD, dan Ketersediaan Anggaran dalam Pelaksanaan Pengelolaan SIPD. Pada variabel tata kelola sistem pemerintahan, peneliti menggunakan indikator instrument Gamatechno (2022). Tata kelola sistem pemerintahan diukur menggunakan skala ordinal 5 point dengan indikatornya yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. Pada variabel teknologi informasi, peneliti menggunakan indikator instrument Dito (2016). Teknologi informasi diukur menggunakan skala ordinal 5 point dengan indikatornya yaitu *Hardware*, *Software*, dan Jaringan. Kemudian Pada variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), peneliti memakai standar instrument Suryaningrat dan Utama (2018). Kualitas sumber daya manusia dikalkulasi menggunakan skala ordinal 5 point dengan indikatornya yaitu Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman, Pelatihan, Pengetahuan. Kemampuan, dan Sikap.

Penulis menggunakan teknik deskriptif untuk menjelaskan temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, memberikan rincian tentang setiap variabel yang diteliti.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Penyajian data yang lebih informatif, termasuk pengelompokan, peringkasan, dan penyajiannya, adalah tujuan dari statistik deskriptif. Uji validitas dan reliabilitas merupakan bagian dari prosedur diagnostik ini. Tanpa adanya data yang dapat dipercaya dan valid, temuan penelitian akan menjadi miring. Keandalan suatu alat penelitian berbanding lurus dengan keakuratan hasilnya. Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas merupakan beberapa asumsi klasik yang digunakan dalam berbagai tahapan pengujian yang banyak melibatkan uji regresi. Sedangkan  $R^2$  adalah ukuran sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi.

Metode analisis data yang dipakai pada riset ini adalah model regresi berganda. Persamaan regresi pada penelitian ini antara lain:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Dimana: Y = Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

A = Konstanta

e = variabel Pengganggu

B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub> = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Tata Kelola Pemerintahan

X<sub>2</sub> = Pemanfaatan Teknologi

X<sub>3</sub> = Kompetensi Sumber Daya Manusia

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

Semua orang mulai dari Pengguna Anggaran (PA) hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, berpartisipasi dalam penelitian ini. Seratus empat puluh delapan kuesioner telah disebarkan untuk penelitian ini. Seluruh 167 (atau 100%) kuesioner telah dikirim, dan 148 (atau 93% dari total kuesioner) telah dikembalikan; selanjutnya, seluruh 148 (atau 93% dari total kuesioner) diproses tanpa penundaan.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## *Uji Instrumen Penelitian*

Uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrument penelitian yang dibentuk untuk mengukur masing-masing variabelnya layak atau valid serta memiliki konsistensi yang baik.

## *Uji Validitas*

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel**  
**Tata Kelola Pemerintahan (X1)**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{kritis}$	Keterangan
TKP1	0,803	0,3	Valid
TKP2	0,839	0,3	Valid
TKP3	0,851	0,3	Valid
TKP4	0,897	0,3	Valid
TKP5	0,862	0,3	Valid
TKP6	0,803	0,3	Valid

*Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS*

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel**  
**Pemanfaatan Teknologi (X2)**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{kritis}$	Keterangan
PT1	0,889	0,3	Valid
PT2	0,937	0,3	Valid
PT3	0,902	0,3	Valid
PT4	0,842	0,3	Valid
PT5	0,869	0,3	Valid

*Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS*

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel**  
**Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{kritis}$	Keterangan
KSDM1	0,806	0,3	Valid
KSDM2	0,838	0,3	Valid
KSDM3	0,901	0,3	Valid
KSDM4	0,875	0,3	Valid



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

KSDM5	0,885	0,3	Valid
-------	-------	-----	-------

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel**  
**Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Y)**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{kritis}$	Keterangan
PSIPD1	0,849	0,3	Valid
PSIPD2	0,860	0,3	Valid
PSIPD3	0,884	0,3	Valid
PSIPD4	0,822	0,3	Valid
PSIPD5	0,889	0,3	Valid
PSIPD6	0,830	0,3	Valid
PSIPD7	0,895	0,3	Valid
PSIPD8	0,907	0,3	Valid
PSIPD9	0,862	0,3	Valid
PSIPD10	0,852	0,3	Valid
PSIPD11	0,729	0,3	Valid
PSIPD12	0,831	0,3	Valid

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Terbukti dari tabel bahwa semua item pernyataan yang diuji memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari rasio ambang batas 0,3, sehingga semua klaim dapat dianggap sah.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Koefisien Alpha	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan (X1)	0,916	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi (X2)	0,932	0,6	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,913	0,6	Reliabel
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Y)	0,964	0,6	Reliabel

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Dapat kita amati bahwa item-item pernyataan pada variabel Tata Kelola, Pemanfaatan Teknologi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai reliabilitas yang lebih baik dari 0,6 dari uji reliabilitas pada kuesioner penelitian, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Temuan ini mendukung hipotesis bahwa item-item pernyataan dalam kuesioner secara akurat mengukur variabel-variabel yang diteliti.

## *Analisis Deskriptif*

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau ringkasan suatu data dengan menampilkan nilai minimum dan maksimum serta rata-rata (mean) dan standar deviasi dari variabel. Berikut ini adalah ikhtisar analisis deskriptif variabel penelitian:

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	148	12	60	48,53	8,07
Tata Kelola Pemerintahan	148	7	30	23,18	3,95
Pemanfaatan Teknologi	148	7	25	19,29	3,43
Kompetensi Sumber Daya Manusia	148	6	25	19,98	3,25
Valid N (listwise)	148				

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

## *Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik*

Ada tiga uji yang membentuk uji asumsi ini: normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

## *Uji Normalitas*

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	148	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.31541735
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.036
Test Statistic	.047	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	

a. Test distribution is Normal.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



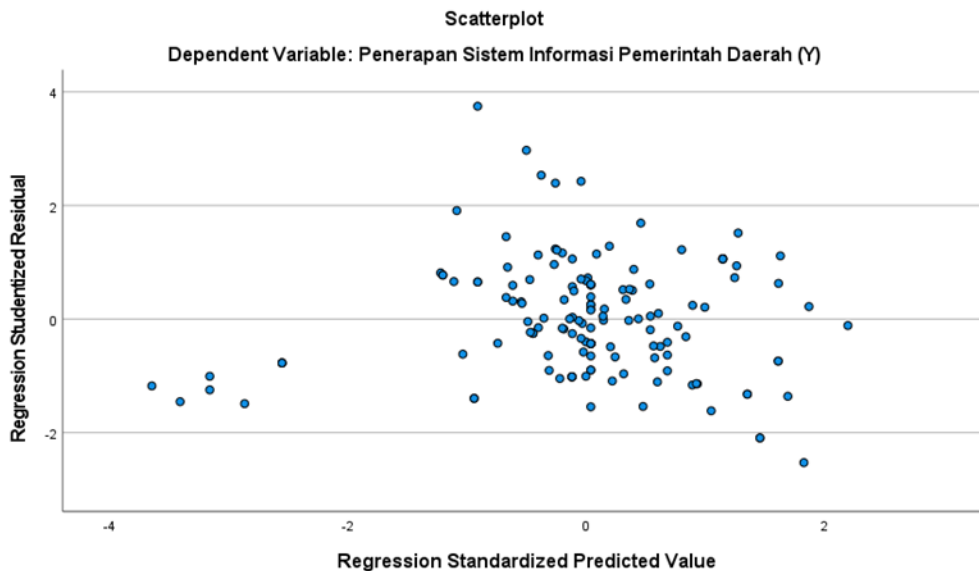
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, tingkat signifikansi untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Pengolahan lebih lanjut dapat dilanjutkan dengan asumsi bahwa data residual mengikuti distribusi normal karena nilai p-value lebih besar dari alpha ( $0,200 > 0,05$ ).

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Titik-titik tampak tersebar secara acak, alih-alih mengikuti pola pada gambar mana pun yang disebutkan di atas. Selain itu, titik-titik pada sumbu Y tersebar di atas dan di bawah angka nol. Singkatnya, heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 8**



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## Nilai VIF Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan (X1)	0,542	1,846	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi (X2)	0,515	1,944	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,502	1,993	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berlandaskan tabel 8 dipahami kalau nilai VIF setiap variabel bebas tidak melebihi 10, yang mana dalam Variabel Tata Kelola Pemerintahan (X1) = 1,846, Pemanfaatan Teknologi (X2) = 1,944 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) = 1,993. Berlandaskan temuan tersebut bisa ditemukan kalau tidak adanya multikolinieritas pada variabel bebas di model.

## Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Jika memakai bantuan aplikasi program SPSS, akan mendapatkan output kalkulasi regresi linier berganda antara lain:

**Tabel 9**  
**Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	7.145	2.484		2.877	0.005	
1	Tata Kelola Pemerintahan (X1)	0.415	0.142	0.217	2.918	0.004
	Teknologi Informasi (X2)	0.724	0.17	0.355	4.645	0.000
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0.654	0.173	0.293	3.790	0.000

a. Dependent Variable: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Y)

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berlandaskan tabel sebelumnya, bisa dipahami kalau nilai konstanta serta koefisien regresi yang membuat bisa dikonsep persamaan regresi berganda antara lain:

$$Y = 7,145 + 0,415 X_1 + 0,724 X_2 + 0,654 X_3$$



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

## *Analisis Koefisien Determinasi*

**Tabel 10**  
**Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753 <sup>a</sup>	0.567	0.558	5.37050
a. Predictors: (Constant), Tata Kelola Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)				
b. Dependent Variable: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Y)				

*Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS*

Berdasarkan tabel sebelumnya, didapatkan penilaian Adjusted R<sup>2</sup> sebanyak 0,558 atau 55,8%. Artinya adalah bahwa sebesar 55,8% Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Tata Kelola Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi, serta kualitas Sumber Daya Manusia. Di sisi lain, tersisa 44,2% disebabkan variabel lainnya yang kurang dimasukkan pada penelitian tersebut seperti tata kelola pemerintahan, budaya organisasi, dan lain-lain.

## *Pengujian Hipotesis (Uji Parsial)*

Temuan kalkulasi uji parsial ialah antara lain:

**Tabel 11**  
**Pengujian Hipotesis (Uji-t)**

Variabel	T Tabel	T Hitung	Sig	Keterangan
(Constant)		2.877	0,005	
Tata Kelola Pemerintahan (X1)	1.977	2.918	0,004	Berpengaruh
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	1.977	4.645	0,000	Berpengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	1.977	3.790	0,000	Berpengaruh

*Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS*

## *Pengujian Hipotesis Variabel Tata Kelola Pemerintahan*

Melalui kalkulasi sebelumnya, didapatkan penilaian  $t_{hitung}$  dalam variabel tata kelola pemerintahan sebanyak 2,918 bersama  $p$ -value sebesar 0,004. Karena penilaian  $p$ -value (sig) <  $\alpha$



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

ataupun  $0,004 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak, dapat diartikan tata kelola pemerintahan berdampak cukup banyak kepada penerapan sistem informasi pemerintah daerah.

### *Pengujian Hipotesis Variabel Pemanfaatan Teknologi*

Melalui kalkulasi sebelumnya didapatkan penilaian  $t_{hitung}$  dalam variabel pemanfaatan teknologi sebanyak 4,645 bersama  $p-value$  sebanyak 0,000. Karena penilaian  $p-value$  ( $sig$ )  $< \alpha$  ataupun  $0,000 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak, artinya manfaat teknologi berdampak cukup banyak kepada implementasi sistematis informasi pemerintah daerah.

### *Pengujian Hipotesis Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia*

Dari perhitungan diatas didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kualitas sumber daya manusia sebanyak 3,790 bersama  $p-value$  sebanyak 0,000. Karena penilaian  $p-value$  ( $sig$ )  $< \alpha$  ataupun  $0,000 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak, dapat diartikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan kepada implementasi sistem informasi pemerintah daerah.

### ***Pembahasan***

#### *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Penerapan SIPD*

Dari pengujian hipotesis didapatkan hasil Tata Kelola Pemerintahan ( $X_1$ ) pengaruh kepada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( $Y$ ). Temuan penelitian ini konsisten dengan gagasan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut teori *stewardship*, seorang steward yang berusaha untuk memenuhi tujuan organisasi tidak akan meninggalkannya; sebaliknya, mereka akan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui kinerja bisnis, yang pada akhirnya akan memaksimalkan fungsi utilitas. Hal ini konsisten dengan penelitian Firmansyah *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

#### *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Penerapan SIPD*

Dari pengujian hipotesis didapatkan hasil Pemanfaatan Teknologi ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( $Y$ ). Temuan penelitian



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

ini mendukung gagasan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut teori steward, steward yang efektif akan mampu meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan dan memuaskan sebagian besar perusahaan lain, karena sebagian besar pemegang saham telah diuntungkan oleh peningkatan kemakmuran yang dicapai perusahaan. Dengan demikian, steward yang pro-organisasi akan terdorong untuk memaksimalkan kesuksesan bisnis selain memenuhi kebutuhan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.*, (2023) yang menyatakan teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD.

### *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SIPD*

Dari pengujian hipotesis didapatkan hasil Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh kepada Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Y). Temuan penelitian ini sejalan dengan gagasan yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut teori penatalayanan, yang didasarkan pada prinsip filosofis bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan bermoral, terdapat korelasi yang kuat antara kepuasan karyawan dan keberhasilan organisasi. Temuan ini mendukung temuan penelitian Azlina *et al.*, (2020) menyatakan *Human Resources Competency* berpengaruh terhadap *Implementation PP Number 12 Year 2019*.

### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian jelas terlihat bahwa SIPD dipengaruhi oleh teknologi informasi, kemampuan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah dianggap siap dalam melaksanakan suatu kebijakan baru apabila tata kelola pemerintahan yang terlaksana dilingkungan kerja sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedural yang idealis. Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak optimal dan tidak memadai mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah baik dari proses perencanaan hingga pelaporannya. Dan pelaksanaan sistem informasi pemerintahan daerah tersebut melalui sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan serta kualitas memadai untuk siap melaksanakan kebijakan teknis sistem dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Riset ini tentu mempunyai batas yang mana hanya dalam Organisasi Pemerintahan Daerah yang berada di 1 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penelitian



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

ini tidak dilakukan wawancara langsung kepada responden. Kemudian terdapat beberapa pergantian jabatan pada struktur pemerintahan Kabupaten Pelalawan, sehingga beberapa posisi jabatan tersebut tidak bisa mengisi kuisisioner penelitian.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan regulasi terbaru, yang dalam riset ini ialah implementasi sistematika informasi pemerintahan daerah. Kemudian bagi organisasi perangkat daerah, temuan riset ini bisa digunakan sebagai pembenahan penerapan atau pelaksanaan regulasi terbaru yang sedang berjalan. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan ruang lingkup penelitian yang lebar lagi serta menambahkan populasi serta sampel penelitian. Kemudian bisa menumbuhkan riset memakai variabel-variabel lainnya misalnya komitmen organisasi, budaya organisasi dll.

## REFERENSI

- Agoes, S., & Ardana, C. (2013). *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aini, F. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). *Jom FEKON*, 2(2), 11–19.
- Basri, Y. M., Riarni, F., Azlina, N., & Indrapraja, M. H. D. (2020). Factors That Influence Whistleblowing Intentions Village Government Official. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 87–93.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Evaluasi Kinerja Pegawai Di Klinik Suherman Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 269–277.
- Devi, K. T. W., & Ratnadi, N. M. D. (2018). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kualitas Informasi Keuangan Pdam Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi*, 2311–2334.
- Dnaberita.com. (2022). Sejumlah OPD Masih Terkendala dalam Penerapan SIPD. Retrieved October 21, 2023, from [www.dnaberita.com](http://www.dnaberita.com)
- Edison, E., Yohny, A., & Imas, K. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Gamatechno. (2022). Tata Kelola TIK. Retrieved October 21, 2023, from <https://blog.gamatechno.com/tag/tata-kelola-tik/>
- Firmansyah *el al.*, (2020). *The Effect Of Good Governance and Information Technology on the Implementation of Accrual-Baased Accounting to Regional Properties*. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* ISSN:1475-7192.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, A. (2018). *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

- Kadir, A. (2018). *Pemrograman Android & Database*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kemenkeu RI. (2023). Profil Kementerian Keuangan RI. Retrieved October 21, 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/>
- Kompasiana.com. (2023). Analisis Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Penerapan Sistem Merit. Retrieved October 21, 2023, from <https://www.kompasiana.com/attinkrisna/6520f374edff7610b8476472/analisis-data-dan-pemanfaatan-sistem-informasi-dalam-penerapan-sistem-merit>
- Mendagri RI. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. T.E.U*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Mendagri RI. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, D. R., & Nugroho, M. A. (2016). Pengembangan Game Edukatif Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Akuntansi Pada Materi Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 14(1), 25–34.
- Sedarmayanti. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Septyaningtyas, W. A., Taufik, T., & Rasuli, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 49–65.
- Siregar, Z. N., Azlina, N., & Rofika. (2023). Pengaruh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 336–349.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.
- Suparno. (2014). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryaningrat, A., & Utama, I. M. S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 23(1), 1–16.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1), 1–12.
- Wilson, N. G. (2014). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yakub. (2014). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yoyo, S., Devyanthi, S., & Sofiaty, Nunung, A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.